



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP) TAHUN 2019



**DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0293) 788407 Fax (0293)
3281091 Kota Mungkid 56511
email dishubkabmagelang@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan karunia Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan. Akan tetapi masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika dibidang pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh Jajaran Perangkat Daerah (PD) sesuai visi dan misi Kabupaten Magelang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 ini pada dasarnya meletakkan perencanaan strategis sebagai langkah awal dan merupakan dasar dalam melakukan pengukuran pencapaian kinerja.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019, semoga bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan / keputusan dalam menetapkan program dan kegiatan urusan Perhubungan yang lebih terarah, efektif dan berdaya guna dan berhasil guna pada tahun - tahun mendatang. Saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Perhubungan.

Kota Mungkid, Pebruari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG

IMAM BASORI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701115 199003 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Magelang sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean goverment* dan *good governance*, LKjIP ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2018 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Magelang “TERWUJUDNYA KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEMANAH (SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH)”.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2019, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP ini diharapkan segenap stakeholders dapat secara bersama- sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang pada tahun 2019 masuk dalam kategori Sedang. Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 .

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan PK Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 menunjukkan bahwa:

- **nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis** dari 1 sasaran strategis adalah 99,73% dengan kategori Sangat tinggi .

dibandingkan tahun 2017 capaian kinerja 78,37% sehingga ada kenaikan 21,36%.

- **Capaian indikator kinerja utama** dari 7 indikator kinerja utama urusan perhubungan rata-rata presentasi capaian sebesar 97,78%. Dikategorikan sangat tinggi, dari tujuh indikator hanya ada satu yang tercapai 75% dengan kategori sedang.

Dengan demikian masih terdapat satu indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori sedang sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 telah menganggarkan pembiayaan sebesar Rp. 33.536.166.000,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.810.550.000,00 yang merupakan Belanja Pegawai yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilab ONS dan Belanja Langsung Rp. 28.725.616.000,00 digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan pelaksana penunjang Program, dengan realisasi penyerapann Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.102.323.832,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 26.068.013.121,00 atau total realisasi penyerapan sebesar Rp. 30.170.336.953,00 atau 89,96% dari total anggaran. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran secara umum disebabkan optimalisasi dalam pengelolaan kegiatan dan monioring secara kontinyu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	Iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Aspek Strategi Organisasi	3
E. Permasalahan Utama Organisasi	12
F. Sistematika	12
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...	14
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran Kinerja Organisasi	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019	29
BAB IV : PENUTUP	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data Sumber Daya Manusia pada Bidang Teknik dan Prasarana Sarana sesuai Kelompok Jabatan Tahun 2019	11
Tabel 1.2	: SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin	11
Tabel 2.1	: Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2014 -2019	15
Tabel 2.2	: Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	16
Tabel 2.3	: Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019 Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	17
Tabel 2.4	: Pemetaan Program dan Kegiatan dan Anggaran per Sasaran	18
Tabel 3.1	: Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja	22
Tabel 3.2	: Pengukuran Kinerja per Sasaran	23
Tabel 3.3	: Realisasi Anggaran per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019 Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	25
Tabel 3.4	: Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019	27
Tabel 3.5	: Pengukuran Kinerja per Sasaran strategis	30
Tabel 3.6	: Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38

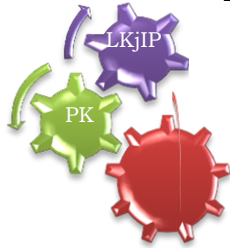
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	:	Peta Wilayah Kabupaten Magelang	6
Gambar 1.2	:	Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin	12
Gambar 3.1	:	Grafik Evaluasi Kinerja per Sasaran	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKjIP Tahun 2019 yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 55);

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 39);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Magelang tahun 2005–2025 dengan Visi RPJP Kabupaten Magelang adalah : “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani”. Untuk mewujudkan visi tersebut dengan memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Magelang, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka ditetapkan moto

pembangunan Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” disingkat “Gemilang”.

Dalam mewujudkan visi RPJPD maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Magelang untuk Tahun 2014 - 2019 adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah). Visi Kepala Daerah tersebut menjadi Visi yang harus diemban oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang sebagai pendukung visi Kepala Daerah, yaitu Sejahtera, Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), Maju dalam Pelaksanaan pembangunan daerah dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik, didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas dan Amanah, Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Terdapat 7 misi sebagai penjabaran visi Bupati Magelang dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang mendukung misi ke tiga yaitu Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di

Bidang Perhubungan, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Letak Geografis

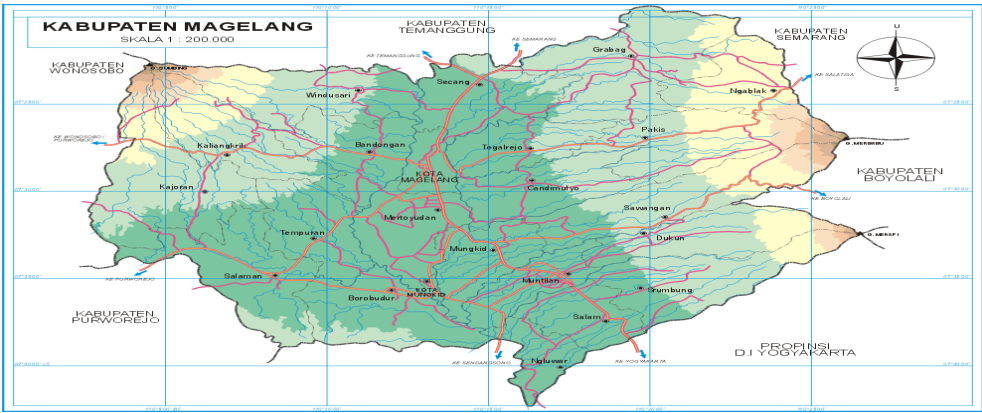
Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Magelang terletak diantara 110^o - 01' - 51" Bujur Timur, 110^o - 26' - 58" Bujur Timur, 7^o - 19' - 13" Lintang Selatan dan 7^o - 42' - 16" Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Selain berbatasan dengan 5 kabupaten dan 1 daerah istimewa di sebelah utara, selatan, timur dan barat Kabupaten Magelang juga berbatasan dengan Kota Magelang yang terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Magelang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, berada di Jalan Soekarno-Hatta Bumirejo, tepatnya di Dusun Pedak Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid. Perbatasan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang sebelah Utara Kecamatan Mertoyudan, Sebelah Selatan Kecamatan Mungkid, Sebelah Timur Kecamatan Mungkid dan sebelah Barat Kecamatan Mertoyudan. Adapun Gambar Peta Wilayah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Peta Wilayah Kabupaten Magelang



Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, berada di Jalan Soekarno-Hatta Bumirejo, tepatnya di Dusun Pedak Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid. Perbatasan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang sebelah Utara Kecamatan Mertoyudan, Sebelah Selatan Kecamatan Mungkid, Sebelah Timur Kecamatan Mungkid dan sebelah Barat Kecamatan Mertoyudan.

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih 1.085,73 km² (108.573 hektar) atau kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 kilometer persegi.

4. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Dasar hukum berdirinya Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

b. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah:

- 1) Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang
 - a) perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, perparkiran, dan kesekretariatan;
 - b) pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
 - c) pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
 - d) pelaksanaan administrasi bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
 - e) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perhubungan;
 - f) pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
 - g) pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran;
 - h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran; dan
 - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris Dinas, membawahi:
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
- 4) Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
 - Seksi Angkutan Orang dan Barang.
 - Seksi Keterminalan.
- 5) Bidang Teknik dan Prasarana Sarana, membawahi :
 - Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Seksi Prasarana dan Sarana Pengujian
- 6) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir

Rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknis, prasarana sarana, pengelolaan kesekretariatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Rincian : 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perhubungan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknis, dan prasarana sarana perhubungan.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknis, dan prasarana sarana perhubungan.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas jalan.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan jalan.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis dan prasarana sarana perhubungan.
- 8) Menyelenggarakan pembinaan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknis, dan prasarana sarana perhubungan.
- 9) Menyelenggarakan fasilitasi di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknis, dan prasarana sarana perhubungan.
- 10) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknis, dan prasarana sarana perhubungan.
- 11) Menyelenggarakan pelayanan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknis, dan prasarana sarana perhubungan.

- 12) Membinadan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) pada Dinas Perhubungan.
- 13) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknis, dan prasarana sarana perhubungan.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- 15) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang yang terbentuk dan efektif melaksanakan tugas dan fungsi pada akhir tahun 2019, didukung dengan sumber daya manusia yang bervariasi. Jumlah keseluruhan pegawai sebanyak 49 Orang. Dari jumlah tersebut terdiri dari 10 orang pejabat struktural dan 39 orang pejabat fungsional umum/ fungsional khusus / fungsional tertentu. Ditinjau dari kelompok jabatan fungsional khusus (JFK) masih ada kekurangan yang sangat krusial sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan dalam pelaksanaan uji KIR Kendaraan Bermotor. Secara lebih rinci kekurangan personil dapat dilihat dalam tabel 1.1. berikut ini :

Tabel 1.1
Data Sumber Daya Manusia pada Bidang Teknik dan Prasarana
Sarana sesuai Kelompok Jabatan Tahun 2019

No	Tenaga Penguji	Jumlah		
		Kebutu han	Ada	Kurang
1	Jabatan Fungsional Pemula	4	0	4
2	Jabatan Fungsional Pelaksana	6	3	3
3	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	4	1	3
4	Jabatan Fungsional Penyelia	3	3	0
	Total	17	7	10

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Tahun 2019

Sementara jika ditinjau dari sisi Gender, maka SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang terdapat 39 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 8 pejabat struktural dan 31 jabatan fungsional umum / tertentu. Sedangkan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 2 pejabat struktural dan 8 jabatan fungsional umum / tertentu. Komposisi tersebut tersaji pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang
Menurut Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Pejabat Struktural	8	2
2.	Jabatan Fungsional Umum/ Tertentu	31	8
JUMLAH		39	10

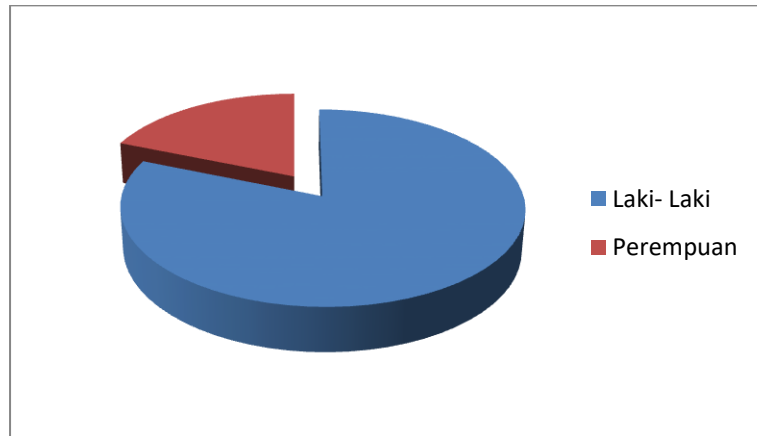
Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.2. dapat digambarkan komposisi SDM pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Menurut

Jenis Kelamin untuk perempuan sebesar 20,41% dan laki-laki sebesar 78,59% seperti dalam gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2

Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin



E. Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan Utama Organisasi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan prasarana angkutan jalan;
2. Belum optimalnya keamanan dan keselamatan lalu lintas;
3. Belum optimalnya layanan angkutan.

F. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang disusun dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum

- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Letak Geografis
 - 3. Pembagian Wilayah Organisasi
 - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
 - 1. Pengukuran Kinerja
 - 2. Evaluasi Kinerja

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif , transparan , dan berorientasi kepada hasil, Dinas Perhubungan telah mencanangkan Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019.

Setiap sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud , tujuan dan karakteristik program .

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Perencanaan yang telah diperjanjikan dalam Renstra dapat disajikan dalam bentuk tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Tahun 2014 -2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Ket
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan	persen	16,05	28,08	16,83	10,22	17,85	10,97	
		Cakupan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	persen	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan Pelayanan Angkutan	persen	11,58	15,89	16,56	17,82	18,64	19,51	
		Cakupan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	persen	0,75	8,31	10,29	49,44	16,25	14,96	
		Cakupan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	persen	12,26	8,92	20,09	13,72	17,72	27,30	
		Cakupan Pemeliharaan LPJU dan Penambahan titik LPJU	persen	45,26	7,3	12,77	9,12	14,6	10,95	
		Cakupan Pengadaan Alat Uji	Persen	0,00	0,00	90,21	4,85	4,94	0,00	

Uraian Sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG

NO	SASARAN STRATEGIS SKPD	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET PROGRAM
1	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan	1 Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan	10,97%
		2 Cakupan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100%
		3 Cakupan Pelayanan Angkutan	19,51%
		4 Cakupan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	14,96%
		5 Cakupan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	27,30%
		6 Cakupan Pemeliharaan LPJU dan Penambahan titik LPJU	10,95%

Berdasarkan tabel di atas terdapat 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perhubungan, dengan 6 (enam) indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2019 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019
DINAS PERHUBUNGAN

	Program	Anggaran	Ket. Sumber Anggaran
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 804.808.000	PAD
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp. 245.103.000	BHP/BP
3	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Rp. 2.079.676.000	BHP/BP
4	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Perhubungan	Rp. 691.537.500	PAD
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 1.960.281.425	BHP/BP
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	Rp. 37.210.664.000	PAD
Jumlah		Rp. 42.992.069.925	

Berdasarkan tabel tersebut, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2019 terdapat 6 (enam) program yang bersumber anggaran dari PAD, BHP/BP, BPH/BP SILPA DAK dan dengan jumlah anggaran Rp. **42.992.069.925** (Empat Puluh Dua Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, dilakukan pemetaan program dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2019
SKPD DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan	10,97%	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	804.808.000	1,87
		Cakupan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100%	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	245.103.000	0,57
		Cakupan Pelayanan Angkutan	19,51%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.079.676.000	4,84
		Cakupan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pehubungan	14,96%	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	691.537.500	1,61
		Cakupan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	27,30%	Program pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.960.281.425	4,56
		Cakupan Pemeliharaan LPJU dan Penambahan titik LPJU	10,95%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37.210.664.000	86,55
				Jumlah	42.992.069.925	100,00

Dari tabel 2.4 di atas, terdapat satu sasaran strategis yang terbagi ke dalam enam indikator sasaran strategis. Pada sasaran strategis Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan dengan Indikator Kinerja Cakupan Pemeliharaan LPJU dan Penambahan titik LPJU mendapat anggaran paling besar persentasenya yaitu sebesar 86,55% dari pagu anggaran yang ada pada Dinas Perhubungan. Hal ini dikarenakan program pengembangan dan pengelolaan penerangan jalan menjadi urusan wajib.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan adalah perwujudan kewajiban Dinas Perhubungan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja , analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja , termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan , hambatan / kendala, dan permasalahan yang dihadapi dan langkah - langkah yang diambil guna mengatasi hambatan / kendala dan permasalahan .

A. Capaian Kinerja Organisasi.

1. Pengukuran Kinerja

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja , perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu . Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan . Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran . Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (*input*) Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misal Sumber Daya Manusia , dana material, waktu , teknologi dan sebagainya .
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari

pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan .

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2018 pada anggaran perubahan dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : *indikator positif* dan *indikator negatif*, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- a. Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

$$\begin{aligned} &\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} \\ &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \end{aligned}$$

- b. Indikator Negatif apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negative, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\begin{aligned} &\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} \\ &= \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan
Predikat / Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Warna
1	91% % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 5	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017.

2. Capaian Kinerja Sasaran

Sebagaimana telah ditetapkan didalam Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dinas Perhubungan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun 2019 untuk mencapai 1 Sasaran .

Dalam usaha mencapai sasaran Dinas Perhubungan menetapkan dalam 6 program dan 39 kegiatan dengan 39 indikator kinerja pencapaian sasaran .

Adapun Hasil Pengukuran kinerja per sasaran strategis pada tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2019 dan target kinerja hingga akhir periode Dinas Perhubungan pada tahun 2019 tampak dalam tabel 3.2, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100%	8	9
1	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan	17,05	10,97	9,82	89,53	10,97	89,53
		Cakupan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	97,28	100,00	98,63	98,63	100,00	98,63
		Cakupan Pelayanan Angkutan	15,78	19,51	16,44	84,28	19,51	84,28
		Cakupan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pehubungan	14,96	14,96	12,74	85,23	14,96	85,23
		Cakupan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	16,59	27,30	2,00	7,31	27,30	7,31
		Cakupan Pemeliharaan LPJU	13,29	10,95	6,31	57,62	10,95	57,62

		dan Penambahan titik LPJU						
Jumlah			28,03	30,61	17,72	57,89	30,61	57,89

Dari Tabel 3.2 di atas dapat kita lihat bahwa Capaian Indikator Kinerja terendah/ sangat rendah terdapat pada Cakupan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan capaian 7,31%, dilanjutkan dengan Capaian Indikator Kinerja rendah ada pada Cakupan Pemeliharaan LPJU dan Penambahan titik LPJU dengan serapan 57,62% hal ini disebabkan pada dua indikator tersebut ada kegiatan yang gagal lelang.

Adapun untuk Realisasi Anggaran per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019 Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang untuk mencapai target indikator pada sasaran strategis pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019
Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	804.808.000	720.514.685	89,53
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	245.103.000	241.748.705	98,63
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.079.676.000	1.752.756.467	84,28
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	691.537.500	589.385.070	85,23
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.960.281.425	143.307.670	7,31
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37.210.664.000	21.441.314.882	57,62
	JUMLAH	42.992.069.925	24.889.027.479	57,89

Sumber : SIMDA Kabupaten Magelang 2019

Dalam pelaksanaan sasaran strategis Dinas Perhubungan didukung 6 program dengan jumlah anggaran Rp. 42.992.069.925 (Empat Puluh Dua Milyard Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 24.889.027.479,00 (Dua Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau tingkat serapan tercapai 57,89%.

Kecuali Kinerja Sasaran, Indikator kinerja Urusan Perhubungan yang akan dicapai selama lima tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019 ada tujuh indikator yang dapat ditampilkan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra 2019	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.121.745	3.705.271	2.373.220	64,05	3.705.271	64,05
2.	Jumlah Ijin Trayek	976	1.069	803	75,12	1069	75,12
3.	Rasio Uji Kendaraan Bermotor	88,10	96,7	89,87	92,94	96,7	92,94
4.	Jumlah Terminal Bis	6	8	6	75,00	8	75,00

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra 2019	Capaian s/d 2018 terhadap 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
5.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Menit)	32	32	32	100,00	32	100,00
6.	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
7.	Pemasangan Rambu-Rambu	111,72	94,00	111,72	118,85	94	118,85
Rata – Rata Persentase Capaian Kinerja Urusan Perhubungan					89,42		

Dari ketujuh indikator diatas, Rata – Rata Persentase Capaian Kinerja Urusan Perhubungan pada Tahun 2019 adalah 89,42 % (tinggi). Kenaikan signifikan terlihat pada indikator Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dari capaian tahun 2018 sebesar 111,72 % pada tahun 2019 terealisasi sebesar 118,85 %.

3. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2019 terhadap 1 (satu) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh ke tiga bidang yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Penetapan Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Tahun 2019 yang mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang 2014-2019. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun IV dari Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2014-2019.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pelaporan kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis, dimana Bobot Indikator Kinerja terhadap Capaian Sasaran strategis tahun 2019 dapat terlihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Pengukuran Kinerja per Sasaran strategis

1. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2019 terhadap 2019 (%)	Keterangan /Predikat
				Target	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan	17,05	10,97	9,82	persen	10,97	89,53	Tinggi
		Cakupan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	97,28	100,00	98,63	persen	100,00	98,63	Sangat Tinggi
		Cakupan Pelayanan Angkutan	15,78	19,51	16,44	persen	19,51	84,28	Tinggi
		Cakupan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pehubungan	14,96	14,96	12,74	persen	14,96	85,23	Tinggi
		Cakupan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	16,59	27,30	2,00	persen	27,30	7,31	Sangat Rendah
		Cakupan Pemeliharaan LPJU dan	13,29	10,95	6,31	persen	10,95	57,62	Rendah

		Penambahan titik LPJU							
		Jumlah	28,03	30,61	17,72	persen	30,61	57,89	Rendah

Dari tabel 3.5 dapat terlihat bahwa rata-rata Capaian kinerja pada Dinas Perhubungan dibandingkan dengan target tahun 2019 dari 6 indikator sebesar 57,89% dengan predikat rendah. Adapun rincian capaian kinerja selama tahun 2019 dari 6 program capaian kinerja dapat disimpulkan sbb :

- a. Sangat tinggi, ada 1 (satu) yaitu Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (98,63%)
- b. Tinggi, ada 3 (tiga) yaitu Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (89,52%), Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (84,26%) dan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan (85,16%).
- c. Rendah, ada 1 (satu) yaitu Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan (57,63%)
- d. Sangat Rendah, ada 1 (satu) yaitu Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas (7,31%)

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019 maka capaian dari 6 Indikator belum ada indikator yang memenuhi target. (target renstra tahun 2019 sejumlah 30,61% baru terealisasi sebesar 17,72% sehingga deviasinya sebesar 12,89%).

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perhubungan masuk dalam predikat Sedang dengan nilai 71,23 %.

Faktor pendorong capaian kinerja adalah:

1. Pekerjaan menyesuaikan alur kas, dan telah terlaksana dengan baik;
2. PPTK mencermati alur kas yang telah dibuat;
3. PPTK koordinasi aktif dengan PPKom, Panitia Pengadaan dan Instansi terkait;
4. PPTK menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Faktor penghambat capaian kinerja rendah adalah:

1. Cakupan wilayah yang terlalu luas dibandingkan dengan kekuatan personil di Dinas Perhubungan;
2. Tidak terlaksananya beberapa pengadaan barang / Jasa;
3. Waktu pelaksanaan karena anggaran perubahan ditetapkan mendekati pada akhir tahun.

Evaluasi kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

A. Evaluasi Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

- 1) Indikator kinerja Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	
				Kinerja	%
C.	Misi III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
4	Urusan Perhubungan				
	117 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	2.373.220	64,05

Capaian kinerja untuk indikator jumlah arus penumpang dari target jumlah arus penumpang angkutan umum sebanyak 3.705.271 penumpang terealisasi sebesar 2.373.220 penumpang atau 64,05 %, penurunan ini diakibatkan karena Target jumlah arus penumpang tahun 2019 diakumulasi dari perkiraan jumlah penumpang pada 7 buah terminal termasuk terminal Muntilan yang sekarang menjadi kewenangan Provinsi, serta penurunan jumlah penumpang tersebut diakibatkan karena tren peningkatan penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor.

2) Indikator kinerja Jumlah Ijin Trayek

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	
				Kinerja	%
C.	Misi III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
4	Urusan Perhubungan				
	118 Jumlah Ijin Trayek	1.069	Jumlah Ijin Trayek	803	75,12

Prosentase indikator jumlah ijin trayek dari target sebesar 1.069 terealisasi sebesar 803 atau 75,12 %. Hal ini dikarenakan adanya kendaraan yang melakukan peremajaan dan pembayaran trayek yang terlambat mengurus perizinan.

3) Indikator kinerja Rasio Uji Kendaraan

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	
				Kinerja	%
C.	Misi III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
4	Urusan Perhubungan				
	119 Rasio Uji Kendaraan	96,7	Rasio Uji Kendaraan	89,87	92,94

Rasio uji kendaraan bermotor membandingkan jumlah kendaraan yang diuji dengan jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Magelang di Tahun 2019. Jumlah kendaraan wajib uji sejumlah 21.688 unit dengan realisasi jumlah kendaraan yang diuji sejumlah 19.491 kendaraan sehingga diperoleh prosentase rasio uji kendaraan sebesar 89,87 %. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kendaraan yang tidak melakukan uji/terlambat uji.

4) Indikator kinerja Jumlah Terminal Bus

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	
				Kinerja	%
C.	Misi III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
4	Urusan Perhubungan				
	120 Jumlah Terminal Bus	8	Jumlah Terminal Bus	6	75,00

Target 8 unit terminal di Tahun 2019 tersebut telah tercapai 6 unit sampai dengan akhir tahun 2019 dengan prosentase capaian sebesar 75,00 % hal ini dikarenakan Terminal Muntilan dengan status terminal Tipe B mulai Tahun 2017 pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rencana Pembangunan Terminal Sawangan Tahun 2018 tidak jadi dilaksanakan karena terkendala teknis.

- 5) Indikator kinerja Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	
				Kinerja	%
C.	Misi III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
4	Urusan Perhubungan				
	121 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	100,00

Indikator kinerja Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) merupakan satuan waktu pelaksanaan uji KIR kendaraan bermotor di unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan waktu selama 32 menit untuk 1 kendaraan melakukan uji, sehingga capaian kinerjanya 100%.

- 6) Tersedianya unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten / Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4.000 (empat ribu) Kendaraan Wajib Uji

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	
				Kinerja	%
C.	Misi III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
4	Urusan Perhubungan				
	122 Tersedianya unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten / Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4.000 (empat ribu) Kendaraan Wajib Uji	Ada	Tersedianya unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten / Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4.000 (empat ribu) Kendaraan Wajib Uji	Ada	100,00

Tersedianya Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan untuk melayani masyarakat dalam melaksanakan uji kelayakan kendaraan (KIR) dilengkapi 12 unit alat uji dengan jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) sejumlah 10.844 unit.

7) Indikator Kinerja Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Capaian	
				Kinerja	%
C.	Misi III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
4	Urusan Perhubungan				
	7. Pemasangan Rambu-Rambu	79,00	%	111,72	141,42

Jumlah target pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Magelang sampai dengan Akhir Tahun 2019 adalah 2.304 unit dan sampai dengan akhir Tahun 2019 telah terpasang sejumlah 2.574 unit sehingga dari target 94% telah tercapai 111,72 %.

B. Analis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Indikator kinerja sasaran pada Urusan Perhubungan Tahun 2019 dari 6 Indikator sasaran tidak ada indikator yang dapat mencapai 100 %, indikator yang menempati peringkat sangat rendah ada 1 yaitu Cakupan Pegendalian dan Pengamanan lalu lintas hanya tercapai 7,31% dan peringkat rendah ada 1 yaitu Cakupan Pemeliharaan LPJU dan Penambahan titik LPJU .

Salah satu faktor penghambat pencapaian indikator ini adalah

- a) Program Pegendalian dan Pengamanan lalu lintas pada Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu, Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan, Pengecatan Marka Jalan tidak dapat dilaksanakan disebabkan terjadinya gagal lelang.
- b) Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU, ada beberapa paket pengadaan tidak dapat dilaksanakan disebabkan terjadinya gagal lelang.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian realisasi fisik sebesar 71,23 % dibandingkan dengan realisasi keuangan sebesar 58,88 % dengan deviasi/ selisih sebesar 28,77 % (dengan kategori D). Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan dengan hasil capaian kinerja sangat rendah. Adapun Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dapat dilihat pada tabel 3.6 antara lain :

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja ≥ 100%	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan	Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan	92,84	89,53	3,31
		Cakupan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100,00	98,63	1,37
		Cakupan Pelayanan Angkutan	100,00	84,28	15,72
		Cakupan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pehubungan	100,00	85,23	14,77

1	2	3	4	5	6=4-5
		Cakupan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	17,09	7,31	9,78
		Cakupan Pemeliharaan LPJU dan Penambahan titik LPJU	69,94	57,62	12,32
			Rata-rata tingkat efisiensi		9,55

Analisis efisiensi berdasarkan tabel 3.6 dibandingkan capaian kinerja dan serapan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Cakupan Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan dengan target kinerja 92,84% terealisasi 100,00% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 804.808.000 ,00 (Delapan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) terealisasi Rp. 720.514.685,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan prosentasi serapan anggaran sejumlah 89,53%. Ada Efisiensi dalam kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat pada belanja jasa kantor (pembayaran Tenaga Non PNS menyesuaikan hari kerja).

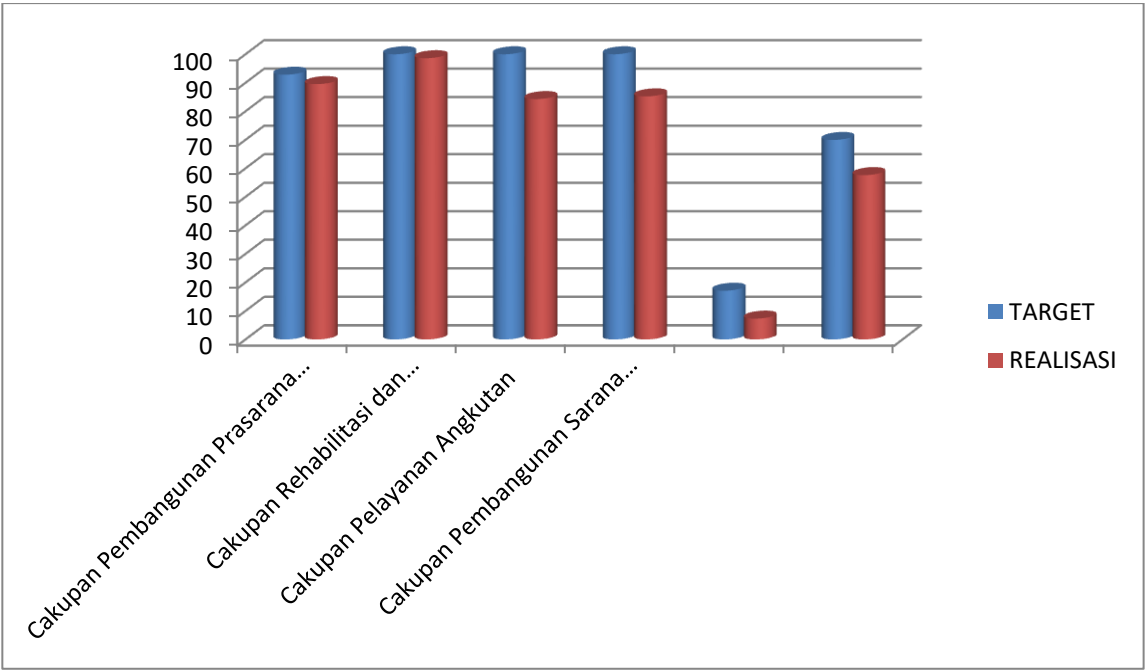
2. Indikator Kinerja Cakupan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan target kinerja 100,00% terealisasi 100,00% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 245.103.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ribu Rupiah) terealisasi Rp. 241.748.705,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah). Ada Efisiensi pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal yaitu pemeliharaan terminal menyesuaikan kondisi di lapangan.
3. Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Angkutan dengan target kinerja 100,00% terealisasi 100,00% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.079.676.000,00 (Dua Milyard Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) terealisasi Rp.1.752.756.467,00 (Satu Milyard Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) Ada Efisiensi pada Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya, Survey Pengembangan dan Penataan Angkutan Umum Dalam Trayek ada pada belanja perjalanan dinas dalam daerah. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dan Pembinaan Pelayanan Angkutan Orang pada belanja perjalanan dinas luar daerah (menyesuaikan kebutuhan)
4. Indikator Kinerja Cakupan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pehubungan dengan target kinerja 100% terealisasi 92,5% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 691.537.500,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) terealisasi Rp. 589.385.070 ,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Rupiah) dengan prosentasi serapan anggaran sejumlah 85,23 %. Ada efisiensi dalam kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Terminal pada Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (FS angkutan barang di Kec tempuran karena sudah terlaksana dan belum diperlukan kajian ulang), Penyusunan Analisis Dampak Lalulintas terdapat sisa kontrak dalam Belanja jasa konsultan perencanaan.

5. Indikator Kinerja Cakupan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan target kinerja 17,09% terealisasi 7,31% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.960.281.425,00 (Satu Milyard Sembilan Ratus Enam Puuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) terealisasi Rp 143.307.670,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan prosentasi serapan anggaran sejumlah 7,31%. Tidak masuk dalam kriteria efisiensi pada Indikator ini dikarenakan sisa anggaran merupakan akibat dari adanya gagal lelang pada kegiatan kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Pengadaan Pagar Pengaman Jalan dan Pengecatan Marka Jalan.
6. Indikator Kinerja Cakupan Pemeliharaan LPJU dan Penambahan titik LPJU dengan target kinerja 69,94% terealisasi 57,62% dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 37.210.664.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyard Dua Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)) terealisasi Rp. 21.441.314.882,00 (Dua Puluh Satu Milyard Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Ada efisiensi dalam kegiatan Pajak Penerangan Jalan Umum pada rekening pembayaran rekening listrik LPJU dampak dari dilaksanakannya program meterisasi tahun lalu sedangkan pada Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU tidak masuk kriteria efisiensi dikarenakan adanya gagal lelang pada paket pengadaan antara lain meterisasi LPJU, Penggantian Tiang LPJU (Ex. Lampu Hias), Penambahan Titik LPJU Rawan Kecelakaan dan Keamanan, Penambahan Titik LPJU Jalur Lingkar Deyangan, Penambahan Titik LPJU Jalur Evakuasi, Penambahan Titik LPJU Jalur Wisata, Penambahan Titik LPJU Sederhana dan Konsultan Pengawas Meterisasi.

Untuk lebih memperjelas evaluasi kinerja maka dapat kami tampilkan dalam bentuk gambar grafik 3. 1. sebagai berikut :

Gambar 3.1.

Grafik Evaluasi Kinerja per Sasaran



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 disusun sebagai salah satu sarana pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2019. Berdasarkan uraian Bab I sampai Bab III dapat disimpulkan bahwa nilai capain kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang pada tahun 2019 dilihat dari realisasi anggaran 58,88 % sedangkan capain fisik mendapatkan nilai 71,23 % apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2018 realisasi anggaran 90,75 % sedangkan capaian fisik mencapai 99,75 % maka realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar 31,87 % sedangkan capain fisik mengalami penurunan sebesar 28,52 %,

a. Tinjauan Umum Keberhasilan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Perencanaan kegiatan / program yang baik
2. Dukungan ketersediaan anggaran
3. Pelaksanaan kegiatan / program yang baik
4. Sarana dan prasarana mendukung

b. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.

Permasalahan atau Kendala dalam pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan adalah :

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada SKPD Dinas Perhubungan masuk dalam predikat Sedang dengan nilai 71,23 %.

Faktor penghambat capaian kinerja rendah adalah:

1. Cakupan wilayah yang terlalu luas dibandingkan dengan kekuatan personil di Dinas Perhubungan;
2. Tidak terlaksananya beberapa pengadaan barang / Jasa;
3. Waktu pelaksanaan karena anggaran perubahan ditetapkan mendekati pada akhir tahun.

c. Strategi Peningkatan Kinerja Organisasi di Masa Mendatang

Langkah antisipasi guna menanggulangi permasalahan dan kendala tersebut antara lain berupa :

1. Dalam melaksanakan kegiatan sebaiknya dibuat rencana atau jadwal pelaksanaan kegiatan dengan matang;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan in house training;
3. Evaluasi secara rutin setiap triwulan atas jadwal belanja masing – masing kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang pada prinsipnya kami telah berusaha menampilkan dan menyajikan kinerja dan hasil kerja yang terbaik demi keberhasilan pelaksanaan tugas namun apabila masih ada kekurangan kami mohon ma'af dan terima kasih .

Kota Mungkid, Pebruari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG

IMAM BASORI, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19701115 199003 1 003

LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja
Lampiran 3.	Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2019
Lampiran 4.	Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan Tahun 2019
Lampiran 5.	Realisasi Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019

REKAPITULASI KEGIATAN TA 2019

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
					(Rp)	%
1	1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian	3	11	1.463.691.400	1.208.676.661	82,58
	2 Perencanaan Pembangunan	1	3	51.839.000	50.070.475	96,59
	3 Administrasi Pemerintahan	1	2	195.613.000	173.835.720	88,87
	4 Perhubungan	5	21	5.781.405.925	3.447.712.597	59,63
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	2	37.210.664.000	21.441.314.882	57,62
		11	39	44.703.213.325	26.321.610.335	58,88

Kota Mungkid, Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG

IMAM BASORI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda

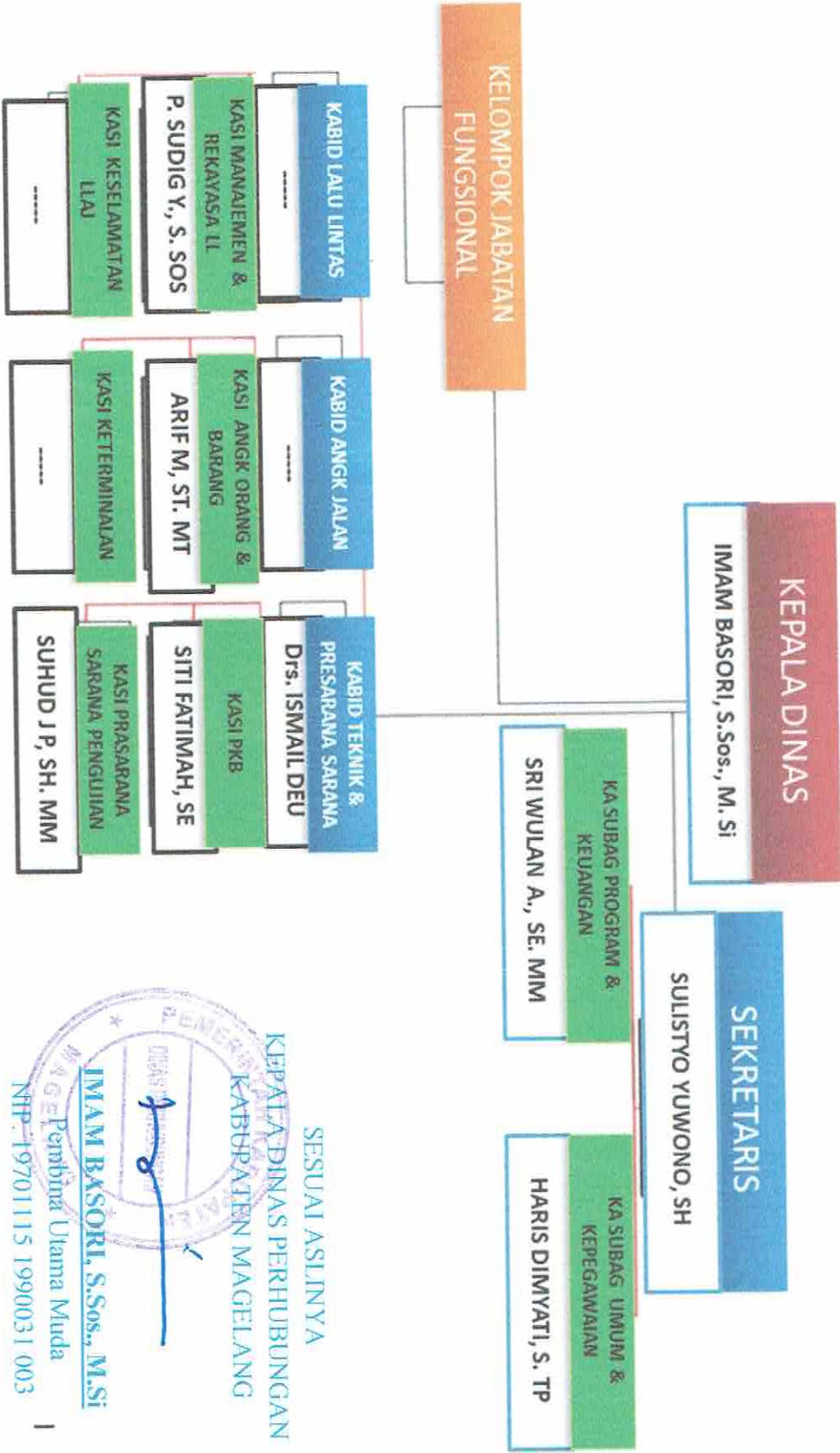
No	Uraian	2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi*	%
1	Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	449.999.600	442.863.000	98,41	457.554.000	464.795.500	101,58	547.698.000	609.002.600	111,19	684.601.000	817.211.000	119,37
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.014.740.000	1.057.372.500	104,20	1.036.740.000	1.056.530.000	101,91	1.130.536.050	1.054.554.000	93,28	1.130.545.000	1.015.680.000	89,84
3	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	50.804.000	48.625.000	95,71	36.864.000	39.198.000	106,33	41.700.000	39.483.000	94,68	43.182.000	40.017.500	92,67
4	Retribusi Terminal	673.426.000	733.342.300	108,90	938.182.500	899.101.000	95,83	638.476.950	541.164.350	84,76	603.467.000	458.659.300	76,00
5	Retribusi Izin Trayek	94.000.000	94.510.000	100,54	92.250.000	94.895.000	102,87	92.750.000	80.252.500	86,53	92.750.000	67.352.000	72,62
6	Retribusi Izin Penempatan Kios/Ruko/Los	7.500.000	9.300.000	124,00	9.600.000	13.200.000	137,50	1.500.000	4.272.100	284,81	7.000.000	2.800.000	40,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Pezinan Tertentu	-	-		0	0		0	0		0	0	
8	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	1.389.700	3.905.200	281,01	0	3.466.800		0	5.133.400		0	9.886.100	
9	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	70.050.000	88.125.000	125,80	286.325.000	412.180.000	143,96	536.455.000	608.930.000	113,51	587.955.000	723.875.500	123,12
10	Pendapatan Denda Retribusi Terminal		466.800		0	0		0	66.000		0	46.200	
11	Pendapatan Denda Retribusi Ijin Trayek	3.250.000	4.251.500	130,82	3.050.000	4.091.500	134,15	3.000.000	3.605.000	120,17	3.000.000	2.965.000	98,83
12	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	4.164.000	6.378.000	153,17	4.164.000	8.034.700	192,96	7.884.000	5.810.000	73,69	0	47.000	
	JUMLAH	2.369.323.300	2.489.139.300	105,06	2.864.729.500	2.995.492.500	104,56	3.000.000.000	2.952.272.950	98,41	3.152.500.000	3.138.539.600	99,56
	% KENAIKAN / PENURUNAN DARI TAHUN SEBELUMNYA				20,91	20,34		4,72	-1,44		5,08	6,31	

* Pendapatan retribusi parkir blm disetor tgl 31 des 2019

62.485.000

1.169.200 (denda)

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG



SESUAI ASLINYA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MAGELANG

IMAM BASORI, S.Sos., M.Si
NIP. 19701115 1990031 003